BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1. Sejarah pemerintah Daerah Kota Cimahi

Sejarah singkat kota Cimahi pada tahun 1962, Cimahi dibentuk kewedanaan meliputi 5 Kecamatan yaitu Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat, dan Cisarua. Selanjutnya, Cimahi sebagai bagian wilayah Kabupaten Bandung menunjukan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan, sehingga yang semmula berstatus Kewedanaan Cimahi, Maka berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 ditingkatkan stastusnya menjadi Kota Administrasif (Kotif) serta diresmikan pada tanggal 29 Januari 1967.

Saat itu Cimahi merupakan kota administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Bitung di sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan. Kotif Cimahi yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Cimahi Selatan, kec. Cimahi Utara dan Kec. Cimahi Tengah. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2001 tentang perubahan atas peaturan daerah kabupaten Bandung Nomor 1 tahun 2001 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2001 sampai dengan 2010, Kotiuf cimahi antara lain ditetapkan sebagai kawasan pemukiman, militer, dan Zona industri.

Setelah 24 tahun terbentuknya kota Administratif Cimahi, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 tahun 1990 tentang pemekaran 24 Kotamadya/Kabupaten menjadi 42 Kotamadya/Kabupaten, maka pada tahun 1998 Universitas Padjadjaran mengadakan peneletian/ studi kelayakan dimekarkannya kabupaten Padalarang.

Dalam hal ini Kotif Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Padalarang dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjadi tonggak sejarah timbulnya tuntutan, desakan dan aspirasi dan berbagai komponen mesyarakat baik secara perorangan maupun kelompok seperti partai politik, forum LSM, Pagutuban, yayasan Pendidikan, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama, untuk memperjuangkan peningkatan status Kotif Cimahi menjadi daerah otonom. Apalagi mengingat Kotif Cimahi adalah pertama dan tertua di jawa Barat yang tetinggal dengan Kotif-kotif lainnya, yang sudah menjadi Kotamadya.

Kotif Cimahi layakl menjadi suatu daerah otonom, hal tersebut setalah diadakannya study Kelayakan oleh perguruan tinggi UNPAD, ITB, UPI, STPDN dan UNJANI. Berdasarkan study kelayakan trsebut, diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD tingkat I Jawa Barat. Dan setelah ada persetujuan dari pemerintah Propinsi Jawa Barat, selanjutnya di usulkan ke Departemen dalam negri dan otonomi darah serta DPR RI. Dan akhirnya setelah menempuh perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan maka ditetapkan Undang-undnag nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi.

2.1.2. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah *"Dengan Iman dan Takwa menuju Dinas Pendapatan yang Profesional, Tngguh dan Produktif"*

b. Misi Dinas pendapatan Kota Cimahi adalah

- Meningkatkan potensi Pendapatan Asli daerah dan penerimaan daerah lainnya berdasarkan potensi yang ada.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengelolaan PAD.
- Meningkatkan saran dan prasarana pendukung kelancaran tugas.

c. Tujuan Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

- Meningkatkan keahlian dan keterampilan aparatur.
- Meningkatakan efesiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatn daerah.
- Menignkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

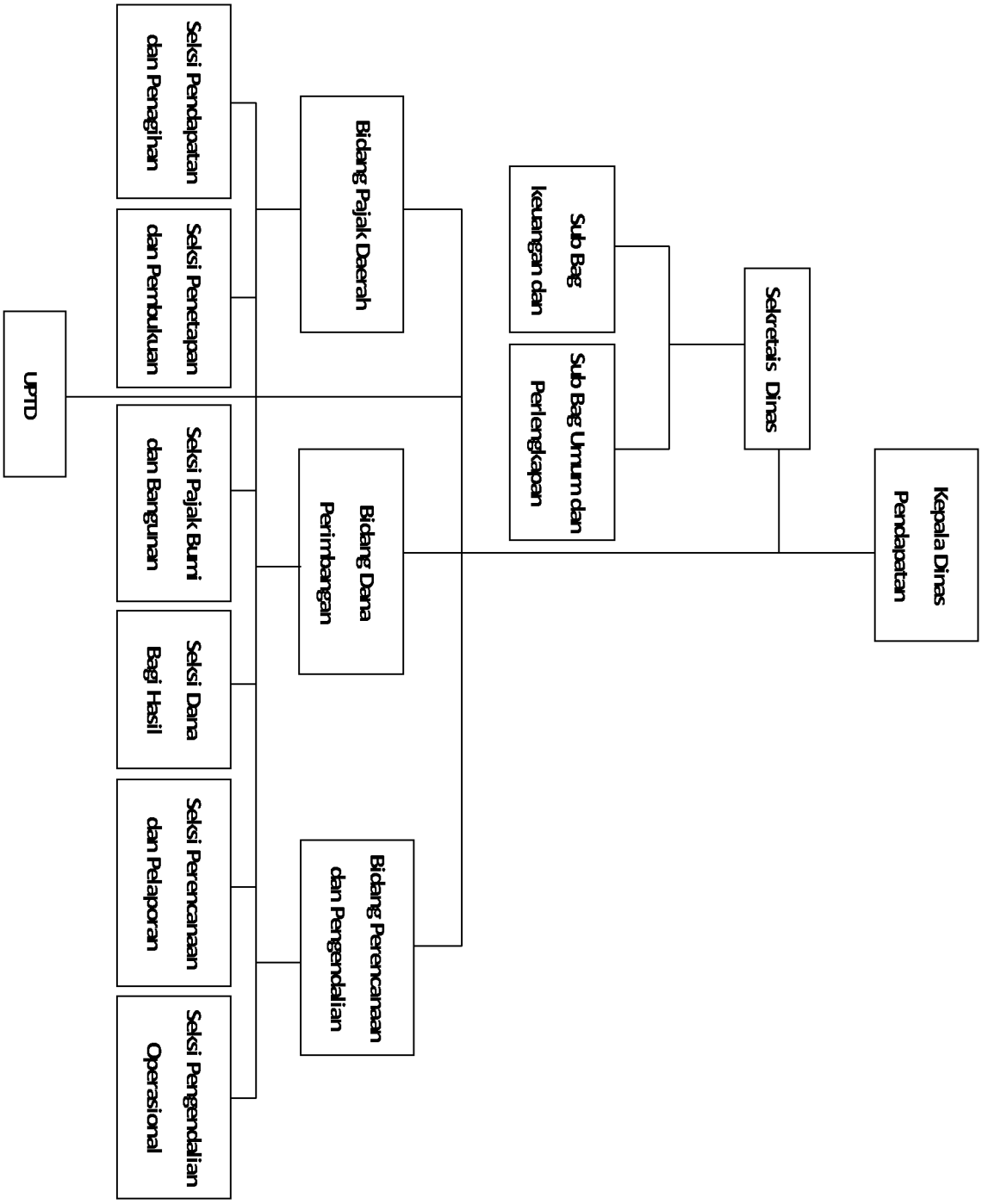
2.2. Strukur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi berbentuk line staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari Kepala Dinas sampai ke bawah menurut suatu garis vertikal (komando). Struktur

organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 terlampir.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Cimahi tersebut diatas, terdiri atas :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, membawahi :
   - Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3) Bidang Pajak Daerah
   - Seksi Pendataan dan Penagihan
   - Seksi Penetapan dan Pembukuan
4) Bidang Dana Perimbangan
   - Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
   - Seksi Dana Perimbangan
5) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi ;
   - Seksi Perencanaan dan Pelaporan
   - Seksi Pengendalian Operasional
6) Unit Pelaksana Teknis
7) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendapatan

2.3. Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat diuraikan mengenai tugas dari masing-masing bagian. Berikut adalah tugas dari masing-masing bagian yang terlibat pada intansi pemerintah kota cimahi.

1. Sekertariat Dinas

Tugas pokok dari Sekertariat adalah Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan serta tugas-tugas bidang secara terpadu. Ada beberapa sub bagian antara lain :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata wrkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi perlengkapan pebekalan dan keperluan tulis serta ruang perkantoran.

b. Sub Bagian Keuangan

   Pembantu bendahara pengeluaran, pembuatan daftar gaji dan belanja tidak langsung dan operator SIKPD

c. Sub Bagian Program dan pelaporan

   Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi, tugas dan konsultasi urusan perencvanaan , evaluasi dan pelaporan yang meliputi peenghimpunan rencana program / kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang.

2. Bidang Identifikasi Pendapatan

Kepala Bidang perencanaan pendapatan tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan dibidang identifikasi pendapatan meliputi perencanaan pendapatan dan pendataan pendapatan. Ada beberapa beberapa seksi dibidang identifikasi antara lain :

a. Seksi Perencanaan Pendapatan

   Melaksanakan sebagian tugas bidang identifikasi pendapatan meliputi perencanaan pendapatan.

b. Seksi Pendataan Pendapatan

   Melaksanakan sebagaian tugas bidang identifikasi pendapatan meliputi pendapatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Bidang Penerimaan Pendapatan

Kepala bidang penerimaan pendapatan melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan di bidang penerimaan pendapatan meliputi penempatan dan pelayanan. Ada beberapa seksi dibidang penerimaan pendapatan antara lain :

a. Seksi Penetapan dan Pelayanan

   Melaksanakan sebagaian tugas bidang penerimaan pendapatan meliputi penetapan dan pelayanan pendapatan daerah khususnya.

b. Seksi Penerimaan Pendapatan

   Melaksanakan sebagian tugas bidang penerimaan pendapatan meliputi pencatatan dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah.

4. Bidang Pengendalian Pendapatan

Bidang ini tugasnya yaitu melaksanakan sebagaian tugas dinas pendapatan di bidang pengendalian pendapatan meliputi pengawasan dan pengendalian pendapatan serta penagihan dan keberatan. Ada berbagai jenis seksi di bidang pengendalian pendapatan antara lain

a. Seksi Pengawasan san Pengendalian

   Melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian pendapatan meliputi pendapatan daerah, perbuatan laporan pendapatan.

b. Seksi Penagihan dan Keberatan

   Melaksanakan sebagian tugas bidang pengendalian pendapatan meliputi penagihan dan keberatan pajak daerah.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

a. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait.
- Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruha

- Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekertaris

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
- Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

c. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan.
- Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan.
- Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

d. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah
- Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
- Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah

e. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan;
- Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- Mengadakan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- Mengadakan Pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- Juru Sita Pajak Daerah;

- Arsiparis dan Pustakawan.

g. Sumber Daya Manusia

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang Pendapatan Daerah , diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.